



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Nomor : B-060/D.PHP.2/PP.04.02/01/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

12 Januari 2023

Yth. Bapak/Ibu
(daftar terlampir)
di –
Jakarta

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Permen PPPA tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan akan menyelenggarakan Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada:

hari/tanggal : Senin, 16 Januari 2023
waktu : pukul 13.00 WIB - selesai
tempat : Ruang Rapat Dewi Sartika Lt. 3 Kemen PPPA

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Saudara untuk memberikan masukan pada rapat dimaksud. Konfirmasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdri. Mutia No. HP. 08119990501 dan Sdri. Annisa No. HP. 0856-1157-796.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Ratna Susianawati

Tembusan Yth.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN UNDANGAN

Nomor : B- 060/D.PHP.2/PP.04.02/01/2023

Tanggal : 12 Januari 2023

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian PPPA

1. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
2. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan;
3. Asisten Deputi PHP Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Asisten Deputi PHP dalam Rumah Tangga dan Rentan;
5. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas;
7. Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat;
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
9. JF Madya dan Muda pada Asdep PHP Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. JF Madya dan Muda pada Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan;
11. Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
12. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asdep Pekerja dan TPPO;
13. Pelaksana Penyusun Rancangan Undang-Undang;

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Ratna Susianawati